

## Sekolah Tatap Muka 5 Hari Sepekan, Murid akan Diselang-seling

JAKARTA (IM) - Dinas Pendidikan DKI Jakarta berencana membuka sekolah tatap muka selama lima hari dalam satu pekan. Rencana ini akan dilakukan pada pekan ketiga September 2021.

Humas Dinas Pendidikan DKI, Taga Radja Gah mengatakan, meski tiap hari masuk kecuali Sabtu-Minggu, murid yang datang ke sekolah akan diselang-seling.

"Tatap belajar tatap mukanya diselang-seling," kata Taga saat dihubungi lewat sambungan telepon pada Kamis (2/9).

Saat dibuka setiap hari nanti, sekolah akan mengatur siswa kelas berapa masuk di hari apa. Misalnya pada tingkat Sekolah Dasar (SD), pada hari Senin yang datang ke sekolah adalah murid kelas 1 dan 4, sementara sisanya belajar secara daring.

Keesokan harinya, yang masuk adalah kelas 2 dan 5,

dan seterusnya. Pola itu berbeda dengan Pembelajaran Tatap Muka (PTM) terbatas yang sekarang diterapkan, di mana murid hanya datang ke sekolah pada hari Senin, Rabu, dan Jumat. Sedangkan pada hari Selasa dan Kamis tidak ada belajar tatap muka guna melakukan penyemprotan disinfektan. Meski begitu, rencana pembukaan sekolah setiap hari itu akan melihat evaluasi dari 2 pekan pembelajaran terbatas yang berlangsung sejak 30 Agustus 2021.

Sejauh ini baru 610 sekolah yang melaksanakan pembelajaran tatap muka terbatas. Menurut Taga, Dinas Pendidikan menargetkan penambahan 890 sekolah lagi. Sehingga, pada pertengahan September ada 1.500 sekolah yang melaksanakan sekolah tatap muka. "Asesmenya selesai hari ini, nanti direkap lalu diajarkan sebagai peserta pelatihan selama dua pekan," tutur dia. ● yan

## Pembukaan Taman Kota akan Hidupkan Lagi UMKM

JAKARTA (IM) - Pengamat kebijakan publik dari Universitas Trisakti, Trubus Rahadiansyah mengemukakan, pembukaan taman-taman kota di Ibu Kota dengan pengawasan protokol kesehatan yang ketat akan berdampak positif bagi para pelaku UMKM.

Karena itu, kata Trubus, Pemerintah DKI Jakarta mestinya membuka kembali operasional taman karena agar dapat membantu perekonomian para pelaku Usaha Mikro Kecil Menengah (UMKM) yang ada di sekitar taman.

"Menurut saya harusnya itu dibuka, karena berpengaruh pada pelaku UMKM di sana," kata Trubus saat dihubungi di Jakarta, Kamis (2/9).

Trubus menilai bila pembukaan mal ditujukan untuk ekonomi, pembukaan taman juga demikian yang akan meningkatkan perekonomian para pelaku UMKM di sana. "Kalau mungkin dibuka, idealnya sampai jam 10 malam supaya ada rentang waktu untuk memberi ruang kepada pedagang kecil mendapat

keuntungan," kata dia. Dia menuturkan pembukaan taman mestinya lebih diprioritaskan karena pengawasan protokol kesehatan lebih mudah dikontrol dibanding di aktivitas di mal. "Jadi harusnya taman lebih prioritas karena protokol bisa diterapkan karena tempatnya lebar dan luas, serta protokol kesehatan juga lebih mudah diawasi," ungkapnya.

Sebelumnya, pemerintah pusat melakukan penyesuaian pada perpanjangan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM) Level 3 melalui Instruksi Menteri Dalam Negeri (Inmendagri) Nomor 38 Tahun 2021. Kemudian Pemprov DKI melalui keputusan gubernur daerah khusus Ibu Kota Jakarta nomor 1055 Tahun 2021 Tentang Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat Level 3 Corona Virus Disease 2019 menyesuaikan waktu operasional kegiatan di mal dan pusat perbelanjaan yang sebelumnya beroperasi sampai pukul 20.00 menjadi pukul 21.00 WIB. ● yan

## SERASA BARU BANGUN DARI TIDUR

### Saipul Jamil: Saya Trauma di Penjara

JAKARTA (IM) - Selebritas Saipul Jamil bebas murni Kamis (2/9) dari Lembaga Perasyarakatan Kelas 1 Cipinang, Jakarta Timur, setelah menjalani masa hukuman selama delapan tahun penjara.

Saat keluar dari Lapas Cipinang, Saipul Jamil disambut oleh perwakilan keluarga, kerabat dan tim kuasa hukumnya yang telah menanti sejak pagi. "Perasaannya bahagia banget terus terang nyawa belum ngumpul kayak orang baru bangun tidur, ngelindur gitu," kata Saipul Jamil saat keluar dari Lapas Kelas 1 Cipinang, Jakarta, Kamis (2/9).

Saipul Jamil mengatakan, hukuman penjara membuatnya sedikit trauma. Meski demikian, ia menganggapnya sebagai pelajaran berharga dalam perjalanan hidupnya. "Pasti trauma, yang jelas ini pengalaman hidup dan pelajaran hidup. Siapa sih yang mau masuk penjara. Saya juga kalau bisa hidup enggak melalui seperti ini. Tapi ini sudah takdir, banyak ilmu yang saya dapat," ujar Saipul.

"Hari ini niat saya mau ke makam orang tua, terus ke makam istri. Setelah itu saya mau mandi di laut tapi lautnya di mana kita lihat aja karena selama ini saya mandi air penjara,"

kata Saipul Jamil.

Kebebasan Saipul Jamil hari ini karena ia mendapat remisi atau pengurangan hukuman sebanyak 30 bulan.

Hal ini juga dipertegas Kepala Lapas Kelas 1 Cipinang, Tony Naingol dan yang mengungkapkannya, Saipul Jamil selama di penjara mendapatkan sebanyak 30 bulan remisi atau pengurangan masa tahanan. Selama di penjara, Saipul Jamil juga dikenal dapat menyesuaikan diri dengan lingkungan dan warga binaan Lapas Kelas 1 Cipinang lainnya.

"Yang bersangkutan kami kenal 'low profile' bisa menyesuaikan diri dengan lingkungan dan warga binaan lain. Beliau juga aktif dalam pembinaan musik di Lapas Kelas 1 Cipinang dan kegiatan ibadah dari agama yang dianut," ujar Tony.

Saipul Jamil dihukum penjara atas dua kasus berbeda yang menjeratnya, yaitu kasus pencabulan dengan hukuman tiga tahun penjara pada 2016. Saipul sempat mengajukan banding ke Pengadilan Tinggi (PT) DKI Jakarta, namun hukumannya diperberat menjadi lima tahun penjara. Di tengah kasus itu, Saipul Jamil terbukti menyuap panitera Pengadilan Negeri Jakarta Utara sebesar Rp250 juta sehingga hukumannya ditambah tiga tahun penjara. ● yan

**PENGUMUMAN**

Para pemegang saham PT MEGA KAPITAL PROPERTINDO, sebuah perseroan terbatas berkedudukan di Jakarta Selatan ("Perseroan") telah menyetujui untuk menuntaskan Modal Dasar, Modal Ditempatkan, dan Modal Disorot Perseroan.

Kepada pihak yang berkeberatan, mohon dapat disampaikan secara tertulis selambat-lambatnya 60 hari kalender sejak pengumuman ini, ditunjukkan ke alamat Perseroan sebagaimana berikut:

Epicentrum Walk Lantai 3 Unit A306  
Kawasan Rasuna Epicentrum  
Jl. H.R. Rasuna Said Kuningan,  
Kel. Karet Kuningan, Kec. Setiabudi,  
Kota Adm. Jakarta Selatan, Prov. DKI Jakarta

Demikian pengumuman ini dilakukan, guna memenuhi ketentuan Undang-undang Nomor 40 Tahun 2007 Tentang Perseroan Terbatas.

Jakarta, 3 September 2021

Hormat kami  
Direksi Perseroan

**PENGUMUMAN**

Berdasarkan Edaran Keputusan Para Pemegang Saham PT Mitrachemical Mulatama, berkedudukan di Jakarta Utara ("Perseroan") tanggal 26 Agustus 2021, yang keputusannya kemudian dimuat dalam Akta No. 8 tanggal 27 Agustus 2021 yang dibuat dan disahkan oleh KASIH, SH., M.Kn, Notaris Kabupaten Bekasi, telah dipulihkan untuk membebaskan Perseroan sehubungan dengan tagihan dan kewajiban Perseroan. Para Pihak yang mempunyai tagihan terhadap Perseroan dapat mengajukan tagihannya disertai dengan bukti pendukung yang sah dan lengkap selambat-lambatnya dalam waktu 60 hari sejak tanggal pengumuman ini kepada Likuidator Perseroan dengan alamat:

Kantor PT MITRA-CHEMICAL MULATAMA  
Jl. Parada Timur Raya Blok F21 No. C.46,  
Kelurahan Sunter Agung, Kecamatan Tanjung Priuk,  
Kota Administrasi Jakarta Utara.

Jakarta, 3 September 2021

Likuidator

**PENGUMUMAN**

Untuk memenuhi ketentuan Pasal 127 Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas, dengan ini diumumkan bahwa akan dilakukan pengambilalihan terhadap sebagian besar saham di dalam PT GEMA INOVASI TEKNOLOGI ("Perseroan") oleh PT INDONESIA FUTURA TEKNOLOGI, keduanya berkedudukan di Jakarta Selatan, yang mengakibatkan perubahan pengendalian dalam Perseroan.

Bagi para pihak yang memiliki tagihan terhadap Perseroan atau keberatan terhadap penjualan saham tersebut, mohon dapat segera menyampaikannya secara tertulis dalam jangka waktu 14 (empat belas) hari sejak tanggal pengumuman ini kepada Direksi Perseroan dengan alamat Wisma Staco Lt. 7, Jl. Casablanca, Menteng Dalam, Tebet, Jakarta Selatan

Jakarta, 3 September 2021

Direksi Perseroan

**PENGUMUMAN**

Untuk memenuhi ketentuan Pasal 127 Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas, dengan ini diumumkan bahwa akan dilakukan pengambilalihan terhadap sebagian besar saham di dalam PT TRIT NUSANTARA EDUKASI ("Perseroan") oleh PT INDONESIA FUTURA TEKNOLOGI, keduanya berkedudukan di Jakarta Selatan, yang mengakibatkan perubahan pengendalian dalam Perseroan.

Bagi para pihak yang memiliki tagihan terhadap Perseroan atau keberatan terhadap penjualan saham tersebut, mohon dapat segera menyampaikannya secara tertulis dalam jangka waktu 14 (empat belas) hari sejak tanggal pengumuman ini kepada Direksi Perseroan dengan alamat Wisma Staco Lt. 7, Jl. Casablanca, Menteng Dalam, Tebet, Jakarta Selatan

Jakarta, 3 September 2021

Direksi Perseroan

# 4 | Metropolis

IDN/ANTARA



## RUSUN PASAR RUMPUT DINONAKTIFKAN SEMENTARA RAWAT PASIEN COVID-19

Sejumlah tenaga kesehatan berjalan dengan membawa barang pribadinya keluar dari Rusun Pasar Rumput, Manggarai, Jakarta, Kamis (2/9). Menurut Koordinator Lapangan Medis Rusun Pasar Rumput, Letkol Arjuniansyah sebanyak 92 tenaga kesehatan dikembalikan ke Rumah Sakit Darurat COVID-19 (RSDC) Wisma Atlet Kemayoran dikarenakan Rusun Pasar Rumput dinonaktifkan sementara dalam merawat pasien terkonfirmasi positif tanpa gejala, tapi disiagakan jika terjadi kembali lonjakan COVID-19.

## WAGUB DKI: NANTI KITA CEK

# 60% Karyawan Transjakarta Dikabarkan Belum Divaksin

Di saat Pemprov DKI Jakarta mewajibkan syarat ketat wajib vaksinasi Covid-19 bagi calon penumpang angkutan umum seperti Transjakarta, MRT Jakarta, dan LRT Jakarta guna mewaspada klaster angkutan umum, sebaliknya pekerja yang bertugas justru belum terlindungi vaksin?

JAKARTA (IM) - Wakil Gubernur DKI Jakarta, Ahmad Riza Patria (Ariza) angkat bicara perihal kabar yang menyatakan 60% karyawan

PT Transjakarta yang belum menjalani vaksinasi Covid-19. Padahal sebagai pelayan publik, harusnya mereka lebih dulu mendapatkan vaksinasi.

"Informasi ini baru saja saya terima, nanti akan dicek. Harusnya semua tenaga kesehatan, tenaga pelayan publik sudah mencapai pendakannya sudah harus selesai mendekati 100 persen," ungkap Ariza di Jakarta, Kamis (2/9).

Ariza pun berharap agar seluruh karyawan PT Transjakarta itu dapat segera mengikuti vaksinasi. "Mudah-mudahan angkanya tidak sebesar itu. Insya Allah nanti kita pastikan semua pelayan publik sudah harus divaksin," tambahnya.

Terakhir, ia pun mengungkap manajemen PT Transja-

karta agar selalu memantau kondisi anak buahnya. Jangan sampai masih ada karyawan yang belum mengikuti vaksinasi.

"Nanti Transjakarta harus memastikan, bahwa seluruh karyawan yang terlibat langsung harusnya sudah divaksin," imbauanya.

Diketahui sebelumnya, Anggota Komisi B DPRD DKI Jakarta, Engeng Malianasari menyatakan baru 60 persen pegawai Transjakarta sudah mendapatkan vaksinasi. Namun, berdasarkan petugas Transjakarta yang mengkoordinir vaksinasi baru 43 persen

yang divaksin.

Sementara, Pemprov DKI Jakarta mewajibkan syarat ketat wajib vaksinasi Covid-19 bagi calon penumpang angkutan umum seperti Transjakarta, MRT Jakarta, dan LRT Jakarta guna mewaspada klaster angkutan umum.

"Bagaimana bisa menuntut seluruh penumpang sudah wajib vaksin, tapi sebaliknya pekerja yang bertugas justru belum terlindungi vaksin? Seharusnya pelayan publik menjadi contoh dan kalau bisa mendekati 100 persen terdivaksin," ujar Engeng dalam siaran tertulisnya. ● yan

## Kantah ATR/BPN Kota Administrasi Jakbar Menuju Pelayanan Profesional dan Terpercaya



JAKARTA (IM) - Perbaikan pelayanan publik di era reformasi merupakan harapan seluruh masyarakat. Namun dalam perjalanannya, ternyata tidak mengalami perubahan yang signifikan dalam pelaksanaannya di beberapa instansi pemerintah karena masih terdapat berbagai tanggapan masyarakat yang justru cenderung menunjukkan bahwa berbagai jenis pelayanan publik mengalami kemunduran yang sebagian ditandai dengan banyaknya penyimpangan dalam layanan publik tersebut.

Sistem dan prosedur pelayanan yang berbelit-belit dan sumber daya manusia yang lambat dalam memberikan pelayanan juga merupakan aspek layanan publik yang banyak disoroti. Akan tetapi banyak juga instansi pemerintah yang berhasil mewujudkan reformasi birokrasi dalam

pelayanannya. Upaya dan komitmen untuk memberikan Pelayanan Publik terbaik kepada masyarakat di era globalisasi dan transformasi digital saat ini, tidak hanya cukup oleh penampilan wajah atau fisik bangunan. Namun peningkatan kualitas petugas pemberi layanan juga harus didukung oleh sarana dan prasarana yang memadai, nyaman, bersih dan tentunya ramah.

Masih rendahnya kualitas pelayanan publik merupakan salah satu sorotan yang diarahkan kepada birokrasi pemerintah dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat dan ini menjadi tantangan dalam melaksanakan reformasi birokrasi untuk mewujudkan layanan yang prima.

Kantor Pertanahan (Kantah) ATR/BPN Kota Administrasi Jakarta Barat sebagai salah Kan-

tor Pertanahan tipe besar yang mempunyai tugas memberikan layanan publik Pertanahan kepada masyarakat telah merubah paradigma tersebut dengan wujud nyata reformasi birokrasi pemerintah dalam memberikan layanannya kepada masyarakat dengan tak hanya beresolek pada fisik bangunan kantor saja tapi juga diikuti dengan wujud peningkatan kualitas dan mutu pelayanannya. Perubahan sangat kentara dimulai di awal tahun 2021 dengan perubahan bentuk/design dan nyamannya Ruang Loker Pelayanan di kantor ini untuk pemohon. Loker dibuat dengan beberapa bagian; terdapat Loker Khusus untuk pemohon tanpa kuasa, Pensiunan, Lansia dan Disabilitas yang tersendiri, Loker Informasi dan Pengaduan di mana masyarakat dapat mendapatkan informasi

berkas layanan dan melakukan diskusi dengan petugas, Loker Informasi Layanan Pertanahan dengan adanya monitor-monitor digital KIOS-K, Sentuh Tanahku dan Papan Digital; terdapat Loker Online dan Validasi untuk pelaksanaan layanan elektronik dan validasi data buku tanah dan bidang tanah.

Kepala Kantah ATR/BPN Kota Administrasi Jakarta Barat, Sri Pranoto, menjelaskan, bahwa telah menginstruksikan kepada seluruh staf dan jajarannya untuk berbuat dan bekerja melayani masyarakat dengan ramah, informatif dan cepat dengan semangat melayani, profesional dan terpercaya. Perubahan Loker Layanan dan Perubahan pola layanan yang dibuat lebih jelas, terarah dan tetap melaksanakan layanan di masa pandemi dengan tetap menjaga protokol pencegahan Covid-19 serta memaksimalkan dan memastikan semua layanan yang sudah elektronik yaitu layanan elektronik untuk Pengecekan, Hak Tanggungan, Roya, SKPT dan Informasi Zona Nilai Tanah untuk wajib dijalankan. Masyarakat pengguna layanan sendiri yang akan merasakan perubahan yang kita lakukan.

Secara internal juga disampaikan bagaimana kami memastikan bahwa semua proses berkas dilakukan dengan menggunakan

dan mengoptimalkan sistem Layanan KKP yang ada, dan secara simultan juga dilakukan perbaikan dan peningkatan kualitas data pertanahan yang ada di kantor ini dan yang paling penting adalah melaksanakan monitoring dan evaluasi sehingga progres dan kendala dapat dicarikan jalan keluarnya.

"Kami siap menerima keluhan dan pengaduan tentang layanan kami untuk perbaikan dan mewujudkan Kantor Pertanahan Kota Administrasi Jakarta Barat menjadi Kantor Pertanahan Modern untuk pelayanan dan Kantor Pertanahan Data Lengkap," tutur Sri Pranoto kepada wartawan sambil menunjukkan beberapa loket ruang pelayanan dan fasilitas digital pelayanan publik Kantah ATR/BPN Kota Administrasi Jakarta Barat, Kamis (2/9) pagi.

"Tak hanya itu, Kantah ATR/BPN Kota Administrasi Jakarta Barat juga bersinergi dengan Pemerintah Provinsi DKI Jakarta, Pemerintah Kota Administrasi Jakarta Barat dengan sinergi bersama dalam beberapa hal antara lain ; adanya pembentukan tim bersama dalam sertifikasi aset Pemerintah Daerah, Integrasi data BPHTB dan koordinasi lainnya dalam rangka pelaksanaan PTSL (Pendafatran Tanah Sistematis Lengkap). ● ber

## Pemkab Bekasi Dukung Sinergitas Proyek Strategi Nasional

BANDUNG (IM) - Pemerintah Kabupaten Bekasi mendukung Proyek Strategi Nasional (PSN). Hal tersebut dikatakan oleh Pj. Sekretaris Daerah (Sekda) Kabupaten Bekasi, Herman Hanapi, saat mengikuti Rapat Koordinasi (Rakor) Sinergitas Kebijakan Pelaksanaan Strategi Nasional, yang berlangsung di Hotel Pullman Grand Bandung, Rabu (1/9).

Rakor tersebut dibuka secara langsung oleh Staf Ahli Gubernur Bidang Ekonomi dan Pembangunan, Berli Hamdani, dan diikuti oleh Kepala Badan Pertanahan Nasional Provinsi Jawa Barat, Staf Ahli, serta Bupati/wakil Bupati, Walikota/wakil Wa-



Peserta Rapat Koordinasi Sinergitas Kebijakan Pelaksanaan Strategi Nasional di Hotel Pullman Grand Bandung, Rabu (1/9).

likota, se-Jawa Barat. Herman mengatakan, akan menyinergi-

kan PSN yang ada di Kabupaten Bekasi, agar menjadi satu kesatuan, guna mempercepat pelaksanaan PSN dan biro administrasi pembangunan.

"Tadi saya hadir bersama Kepala BPN Kabupaten Bekasi. Dari rakor ini kita akan mengoordinasikan agar PSN bisa segera terselesaikan, dan seluruh tanah-tanah yang ada di Kabupaten Bekasi ini bersertifikasi," ujarnya dalam rilis Prokopim Setdak Bekasi, Rabu (1/9) sore.

Sementara itu, Staf Ahli Gubernur Bidang Ekonomi dan Pembangunan, Berli

Hamdani, mengatakan pelaksanaan pembangunan daerah ini ditujukan untuk peningkatan dan pendataan masyarakat, penciptaan kesempatan kerja, serta meningkatkan akses yang berkualitas.

Dalam hal pelayanan publik juga perlu adanya sinergitas serta strategi dalam kebijakan untuk pelaksanaan program strategi nasional PSN di Provinsi Jabar.

"Sebagai salah satu daerah penyangga ibu kota di DKI Jakarta, Provinsi Jabar ini memiliki lokasi yang strategis, serta memiliki keterkaitan eko-

nomi yang kuat dalam penyediaan pelayanan dan fasilitas publik, serta sebagai wilayah yang mendukung program investasi, di sektor industri pengolahan dan industri jasa," ujarnya.

Selain itu, dirinya mengatakan sesuai dengan harapan dari Presiden RI Joko Widodo, untuk bisa memrioritaskan PSN yang berdampak langsung bagi pemerataan dan penguatan ekonomi rakyat seperti, program sertifikat tanah untuk rakyat, legalisasi lahan transmigrasi, reforma agraria, perhutanan sosial, serta pemerataan perkembangan rakyat. Dimana program-program tersebut harus tetap dipastikan berjalan namun dengan memperhatikan protokol kesehatan secara ketat.

Lebih lanjut, Ia mengatakan agar dilakukan pendataan aset secara lebih baik, dan wilayah pantai selatan Jawa Barat juga harus dijadi-prioritas dengan penerapan *project management office*.

"Saya harap rakor ini bisa menghasilkan suatu output bisa di laksanakan bersama dengan sinergitas antar Pemerintah Pusat, Pemerintah Provinsi dan Pemerintah Daerah," ucapnya. ● mdl

FOTO: DOK.PIM, PROKOPIM SETDA KABUPATEN BEKASI